RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2023
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PONTIANAK

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran				Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kegiatan		Rencana Aksi	Anggaran (Rp)	Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Jadwal Kegiatan												Keterangan
		Tri 1	Tri 2	Tri 3	Tri 4								Tri 1			Tri 2			Tri 3			Tri 4			
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3				4	5	6		7	8	9	10												11
1. Penerapan e-Government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang aman, efektif dan efisien	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)				3,31	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan SPBE	97	Persen		Rp 2.483.287.237	Bidang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis													
						1. Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	1. Jumlah domain pemerintah pusat dan sub domain pemerintah daerah yang dikelola dan terkoneksi dalam jaringan intra pemerintah daerah	31	Domain / Sub Domain		Rp 119.659.548													
						1.1 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	1.1 Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	Pengelolaan (pemberian nama domain, pengawasan dan evaluasi domain di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak)	Rp 108.496.458	SUB SUBSTANSI SARANA DAN PRASARANA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI												
						1.2 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1.2 Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1	Unit	Pembangunan jaringan intra pemerintah daerah (jaringan fiber optic)	Rp 11.163.090	SUB SUBSTANSI SARANA DAN PRASARANA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI												
						2. Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	2. Jumlah layanan publik dan administrasi yang terintegrasi	2	Aplikasi / Layanan Publik		Rp 2.363.627.689													
						2.1 Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	2.2 Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1	Unit	Operasional server / pusat data pemerintah daerah	Rp 1.853.005.529													
						2.2 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	2.3 Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	1	Unit	Pengembangan Aplikasi POSLIB	Rp 60.000.000													
						2.3 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	2.4 Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	1	Layanan	Peningkatan / Pengembangan Aplikasi Interoperabilitas	Rp 66.500.000													
						2.4 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	2.5 Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1	Dokumen	1) Perubahan Masterplan Smart City ; 2) Penyusunan SK Dewan Pontianak Smart City, 3) Penyusunan Tim Teknis Pontianak Smart City Koordinasi, 4) Pemberdayaan Forum Pontianak Smart City 5) monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pontianak Smart City	Rp 302.231.160													
						2.5 Pengembangan dan pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	2.6 Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1	Dokumen	Penyediaan akses komunikasi melalui jaringan intra pemerintah daerah	Rp 46.261.000													
						2.6 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	2.7 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1	Dokumen	1) Penyusunan Draft SK Evaluator Internal SPBE, 2) Koordinasi, Analisis dan evaluasi SPBE Pemerintah Kota Pontianak	Rp 35.630.000													
1. Penerapan e-Government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang aman, efektif dan efisien	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)				3,31	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Keamanan Informasi Pemerintah	Baik	Indeks		Rp 121.716.987	Bidang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika													
						3. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	3. Jumlah area informasi yang telah diamankan dengan persandian	1	area		Rp 111.751.987													
						3.1 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.1 Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang	1	Dokumen	Penyusunan draft Perwa terkait sistem keamanan	Rp 9.980.000													
						3.2 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	3.2 Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2	Laporan	Pemeriksaan / audit sistem informasi di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak	Rp 10.995.000													
						3.3 Pelaksanaan Kemanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	3.3 Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	20	Laporan	Pelaksanaan pengamanan sistem elektronik / kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak	Rp 88.326.987													
						3.4 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	3.4 Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	10	Perangkat Daerah	Penerbitan Sertifikat Elektronik / Tanda Tangan Digital untuk Kepala Perangkat Daerah / Pejabat yang ditunjuk di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak	Rp 2.450.000													
						4. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	4. Persentase Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	50	Persen		Rp 9.965.000													
						4.1 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	4.1 Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	6	Perangkat Daerah		Rp 9.965.000													
						PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik yang mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	92	Persen		Rp 538.943.720	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik													

2.	Transparansi Informasi Publik	Indeks Layanan Informasi dan Komunikasi Publik TOTAL DARI NILAI PER UNSUR* TOTAL UNSUR YANG TERISI *Unsur SKM	X NILAI PENIMBANG			Baik	5.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	5.	Jumlah informasi publik pemerintah daerah yang dikelola dan dipublikasikan kepada masyarakat	14	Informasi			Rp	538.943.720	
							5.1	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	5.1	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	12	Dokumen			Rp	43.120.000	
							5.2	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	5.2	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	12	Dokumen		Pembuatan konten informasi dan penyebaran informasi melalui media sosial	Rp	257.973.220	
							5.3	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	5.3	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1	Dokumen		Pengelolaan website Pemerintah Kota Pontianak dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak serta pelaksanaan diseminasi informasi	Rp	20.281.800	
							5.4	Pelayanan Informasi Publik	5.4	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	13	Dokumen		Pengelolaan layanan pengaduan publik	Rp	96.155.600	
							5.5	Layanan Hubungan Media	5.5	Jumlah Layanan Hubungan Media	4	Layanan		Pelaksanaan siaran pers / penyebaran informasi melalui media cetak, media online dan media elektronik	Rp	50.015.000	
							5.6	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	5.6	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	4	Dokumen		Pembinaan dan pemberdayaan komunitas (Kelompok Informasi Masyarakat)	Rp	50.971.800	
							5.7	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	5.7	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	2	Dokumen		Pelayanan informasi dan dokumentasi melalui media PPID Kota Pontianak	Rp	20.426.300	
2.	Transparansi Informasi Publik	Indeks Layanan Informasi dan Komunikasi Publik TOTAL DARI NILAI PER UNSUR* TOTAL UNSUR YANG TERISI *Unsur SKM	X NILAI PENIMBANG			Baik		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Persentase Tingkat terselenggaranya kegiatan Statistik Sektoral Kota Pontianak	95	persen			Rp	399.990.500	Bidang Statistik Sektoral
							6.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	6.	Jumlah data statistik sektoral di Kota Pontianak yang terbarukan / terupdate	1800	data			Rp	399.990.500	
							6.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	6.1	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	4	Kali		1) Koordinasi, sinkronisasi dan pengumpulan data statistik sektoral ; 2) Forum Data Kota Pontianak	Rp	50.335.000	
							6.2	Peningkatan Kapasitas SDM PEMDA dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	6.2	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	30	Orang		Pelaksanaan sosialiasi dan pendampingan terkait pengumpulan data statistik sektoral	Rp	34.360.000	
							6.3	Membangun Metadata Statistik Sektoral	6.3	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	2	Dokumen		Pengumpulan kuisioner metadata dan penyusunan Buku Metadata	Rp	34.990.000	
							6.4	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	6.4	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	30	Orang		Pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data statistik sektoral, data dinamis dan Pontianak Dalam Angka	Rp	44.975.000	
							6.5	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	6.5	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	2	Dokumen		Penyusunan profil Kota Pontianak	Rp	235.330.500	
								PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		Persentase tingkat Kepuasan Bidang / Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	96	persen			Rp	5.914.076.282	
							7.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	22	Dokumen			Rp	41.648.200	
							7.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	Dokumen		Penyusunan Dokumen Perencanaan: 1) Rencana Strategis RPD; 2) Rencana Kinerja Tahunan; 3) Rencana Kinerja Tahunan Perubahan; 4) Perjanjian Kinerja ; 5) Perjanjian Kinerja Perubahan; 6) Rencana Kerja; 7) Rencana Kerja Perubahan	Rp	23.044.800	SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
							7.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.2	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1	Dokumen		Koordinasi dan Pembahasan Penyusunan rencana kerja anggaran	Rp	9.926.800	SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
							7.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.3	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen		Pelaksanaan Koordinasi dan Pembahasan Penyusunan rencana perubahan anggaran /sub kegiatan	Rp	1.728.000	SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN

	7.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.4	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Laporan	Penyusunan LAKIP Perangkat Daerah, LPPD, Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Semester I, Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Semester II	Rp	2.304.000	SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	7.5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.5	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan 1, Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan 2, Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan 3, Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan 4	Rp	4.644.600	SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	8.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.	Jangka waktu pemenuhan operasional Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12	bulan		Rp	5.168.122.326	
	8.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.1	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31	Orang / Bulan	Penyediaan gaji dan tambahan penghasilan ASN	Rp	4.900.211.326	SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	8.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8.2	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	Pelaksanaan tugas administrasi ASN	Rp	17.600.000	SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	8.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	8.3	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	Pelaksanaan penatausahaan keuangan Perangkat Daerah (Laporan Realisasi Anggaran dan SPJ Fungsional) Bulanan	Rp	244.560.000	SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	8.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	8.4	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	Dokumen	Pelaksanaan koordinasi akuntansi keuangan perangkat daerah	Rp	1.170.000	SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	8.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.5	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	Penyusunan CALK Perangkat Daerah	Rp	850.000	SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	8.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	8.6	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	4	Laporan	Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah (LRA, LO, LPE dan Neraca) per triwulan	Rp	3.731.000	SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	9.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9.	Jangka waktu pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12	bulan		Rp	68.440.000	
	9.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	9.1	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2	Paket	Pengadaan pakaian dinas ASN dan Non ASN	Rp	50.440.000	SUBBAG UMUM DAN APARATUR
	9.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	9.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3	orang	Pelaksanaan diklat dan bimtek ASN	Rp	18.000.000	SUBBAG UMUM DAN APARATUR
	10.	Administrasi Umum	10.	Jangka Waktu Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	bulan		Rp	213.464.264	
	10.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	10.1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor perangkat daerah	Rp	8.864.764	SUBBAG UMUM DAN APARATUR
	10.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.2	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9	Paket	Penyediaan Kendaraan Hias Untuk Event Kota Pontianak	Rp	144.690.400	SUBBAG UMUM DAN APARATUR
	10.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.3	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor perangkat daerah	Rp	25.377.100	SUBBAG UMUM DAN APARATUR
	10.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10.4	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen	Penyediaan makan minum rapat, alat kebersihan dan logistiki kantor lainnya	Rp	8.880.000	SUBBAG UMUM DAN APARATUR
	10.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.5	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	Laporan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dokumen perangkat daerah	Rp	25.652.000	SUBBAG UMUM DAN APARATUR
	11.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11.	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	20	unit		Rp	85.788.312	
3.	11.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.1	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	unit	Pengadaan komputer, laptop dan peralatan / mesin lainnya	Rp	85.788.312	SUBBAG UMUM DAN APARATUR
	12.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.	Jangka Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	bulan		Rp	264.659.680	
	12.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	Penyediaan materai dan biaya pengiriman	Rp	4.980.000	SUBBAG UMUM DAN APARATUR
	12.2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12.2	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	Pembayaran langganan internet / indihome	Rp	14.149.600	SUBBAG UMUM DAN APARATUR
	12.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12.3	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	Laporan	Penyediaan jasa layanan kebersihan kantor	Rp	245.530.080	SUBBAG UMUM DAN APARATUR
	13.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	91	unit		Rp	71.953.500	
	12.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12.1	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	32.783.500	SUBBAG UMUM DAN APARATUR
	12.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.2	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	89	unit	Pemeliharaan peralatan dan mesin perangkat daerah	Rp	39.170.000	SUBBAG UMUM DAN APARATUR

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA PONTIANAK

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Drs. Zulkarnain, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660127 198603 1 009